

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(ILPPD)  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2015**

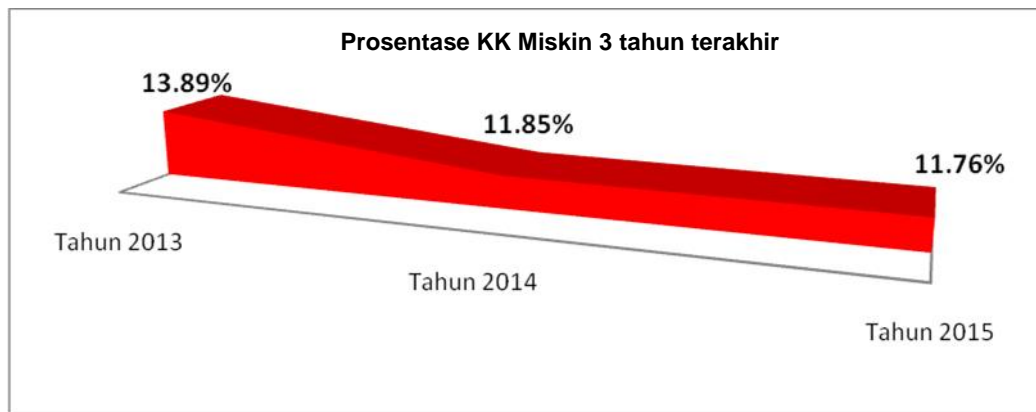
Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini, kami dapat menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015.

Meskipun terdapat dinamika kepemimpinan daerah selama tahun 2015, namun kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk melaksanakan 11 prioritas yaitu *pertama*, Penanggulangan kemiskinan; *kedua*, Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; *ketiga*, Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); *keempat*, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; *kelima*, Peningkatan kualitas kesehatan; *keenam*, Peningkatan kualitas pendidikan; *ketujuh*, Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; *kedelapan*, Menjaga stabilitas ketahanan pangan; *kesembilan*, Peningkatan pengelolaan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, *kesepuluh*, Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban; dan *kesebelas*, Peningkatan kesetaraan gender.

**Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, program kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari upaya mengurangi pengangguran, memperluas kesempatan kerja, peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

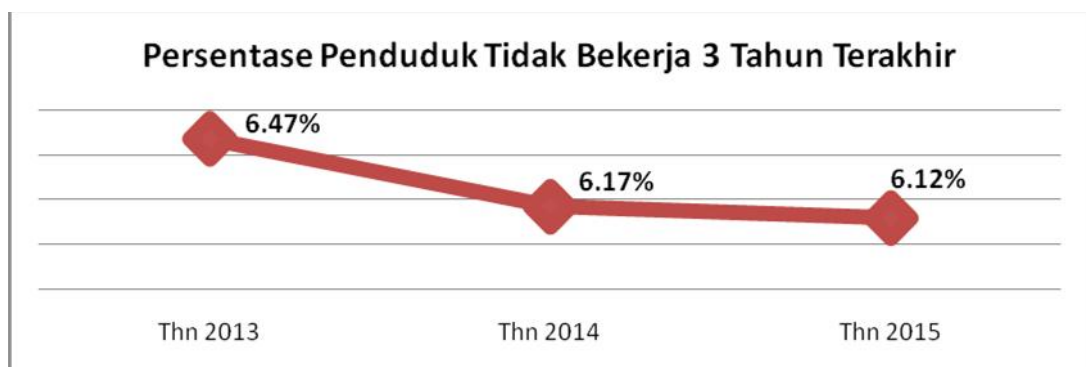
Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan secara koordinatif melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ada hingga tingkat padukuhan. Berdasarkan data penduduk akhir tahun, jumlah KK miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 41.023 KK miskin dari 361.263 KK atau 11,36%, menurun 0,5% dibandingkan data tahun lalu.



Bentuk fasilitasi bagi kelompok miskin antara lain dilakukan melalui program keluarga harapan tingkat kecamatan sejumlah 3.029 rumah tangga miskin dengan nominal bantuan sebesar Rp.5,3 milyar lebih. Pemberian beasiswa pendidikan bagi 3.543 siswa masyarakat miskin dan rentan miskin sebesar Rp12 milyar lebih, bantuan premi untuk jamkesda bagi 68.668 jiwa masyarakat miskin dan 39.464 jiwa masyarakat rentan miskin sebesar Rp38 milyar lebih serta bedah rumah untuk 111 unit rumah yang tersebar di 13 kecamatan sebesar Rp1,199 milyar.

Upaya dalam mengatasi pengangguran, kebijakan yang dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan penduduk untuk dapat membuka atau memperluas lapangan kerja dan meningkatkan informasi peluang usaha.

Pada tahun 2015. jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 534.725 jiwa atau 93.87% dari angkatan kerja sebanyak 569.584 jiwa.



### Peningkatan Dan Pemberdayaan Ekonomi

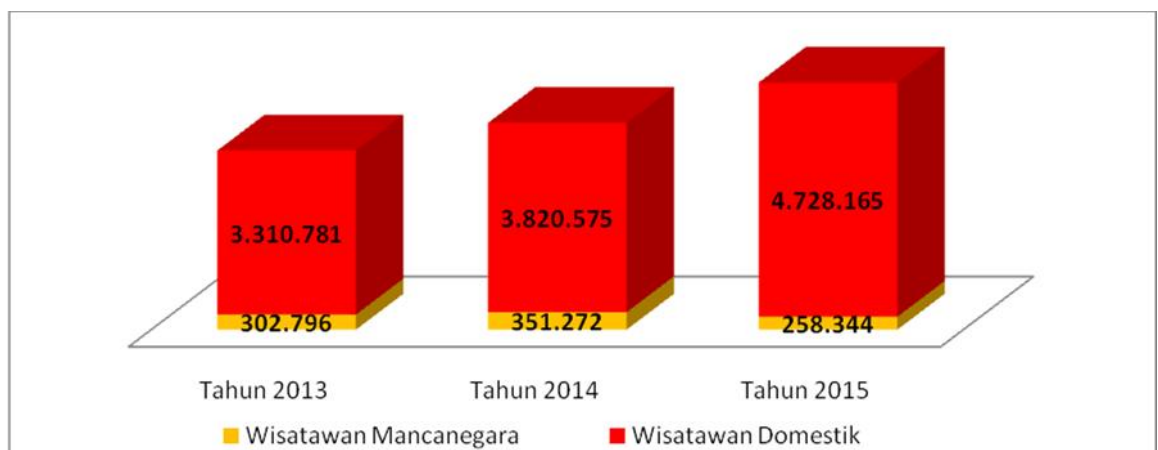
Prioritas peningkatan dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat didukung dengan mendorong kegiatan ekonomi produktif yang potensial ada di masyarakat. Salah satu potensi ekonomi di Sleman adalah Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). Kepada para pelaku dan *stakeholders* terkait dilakukan upaya peningkatan kualitas manajemen usaha, akses terhadap permodalan, inovasi produk usaha, meningkatkan kualitas hasil produk, dan perluasan pemasaran hasil produk.

Koperasi dalam perekonomian masyarakat diupayakan dapat dipertahankan sebagai salah satu penopang ekonomi. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah mampu meningkatkan jumlah koperasi, volume usaha koperasi, dan kualitas kelembagaan koperasi. Volume usaha koperasi selama tahun 2015 dapat mencapai Rp1,071 triliun. Penghargaan atas pembinaan koperasi di Sleman diapresiasi oleh pemerintah dengan diberikannya Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia.

### Sektor Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu sektor potensial untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja terus dikembangkan melalui promosi, pengembangan destinasi, dan pengembangan kemitraan. Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan, berhasil meningkatkan jumlah wisatawan.



Penambahan jumlah wisatawan juga didukung adanya peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2015 seperti jumlah hotel naik 5,9%, restoran naik 12,31%, dan biro perjalanan wisata naik 7,6%.

### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kondisi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah ASN sampai akhir tahun 2015 sebanyak 11.841 orang menurun 289 orang dibanding tahun sebelumnya. Secara kuantitas, jumlah ASN Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan setiap

tahunnya. Dengan adanya keterbatasan tersebut, guna menjaga kualitas pelayanan publik, upaya yang dilakukan melalui peningkatan kualitas ASN, penerapan sistem dan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan tenaga harian lepas secara selektif.

Dalam aspek sistem, prosedur, dan tata kerja, pemerintah daerah selalu melakukan kajian dan evaluasi untuk perbaikan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penyempurnaan sistem perizinan satu pintu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu secara bertahap, pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada semua SKPD, akreditasi lembaga pelayanan publik, pelimpahan kewenangan perizinan kepada kecamatan, dan penerapan standar manajemen mutu ISO.

Dalam hal pengelolaan APBD, diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan mengefektifkan pengelolaan belanja daerah. Pelaksanaan kinerja APBD Tahun 2015 dapat direalisasikan meliputi pendapatan mencapai Rp2,294 triliun rupiah atau 101,43% dari target. Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai sebesar Rp643,111 milyar meningkat 0,74% dibandingkan tahun lalu. Belanja mencapai Rp2,328 triliun rupiah atau 84,02% dari target, sedangkan pembiayaan penerimaan sebesar Rp530,48 milyar rupiah dan pembiayaan pengeluaran sebesar 17,83 milyar rupiah sehingga pembiayaan netto mencapai Rp512,65 milyar rupiah.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja, setiap tahun dilakukan penyusunan laporan keuangan secara tertib dan secara periodik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 berhasil dipertahankan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, prinsip transparansi selalu diwujudkan dengan memberikan informasi terbuka kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sleman mendapatkan penilaian dari Pemerintah Pusat dengan predikat yang baik. Point yang diraih selalu meningkat, terakhir dari 70,54 point (predikat B) pada laporan tahun 2014 menjadi 76,9 point (predikat BB) pada laporan tahun 2015.

Pembangunan sistem informasi secara elektronik terus dikembangkan untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dari sistem perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengendalian, hingga evaluasi dan pelaporan. Sampai

dengan tahun 2015 telah dibangun 56 buah Sistem Informasi Manajemen (SIM). Secara umum, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sleman sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang kembali diterima pada tahun 2015 berupa *Indonesia Digital Society Award* (IDSA). Predikat penghargaan yang diraih adalah *The 1st Champion of E-Government, The 1st Champion of E-Tourism, The 1st Champion of E-Education* dan *The 1st Champion of E-Health* untuk kategori kabupaten.

Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan pada upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari aspek pemberdayaan pemerintahan desa, telah disalurkan dana desa dan pemberian dana alokasi desa serta dana bantuan lainnya. Selama tahun 2015 telah ditransfer Dana Desa sebesar Rp28,04 milyar lebih dan dialokasikan dana kepada pemerintah desa melalui APBD meliputi ADD sebesar Rp103,21 milyar lebih, Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp29,72 milyar lebih, dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp2,31 milyar lebih. Besaran dana ADD meningkat 6,8 kali dari besaran tahun sebelumnya.

### **Kondisi Kesehatan Terus Meningkat**

Kondisi kesehatan masyarakat sampai dengan akhir tahun 2015, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat lebih baik. Hal tersebut tergambar dari beberapa indikator dalam bidang kesehatan, antara lain usia harapan hidup dapat dipertahankan pada angka 76,13 tahun, angka kematian bayi dapat ditekan menjadi 3,61 dari 4,65 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan dapat diturunkan menjadi 29,30 dari 83,29 per 10.000 kelahiran hidup, persentase balita gizi buruk menurun dari 0,44% menjadi 0,40%, cakupan rumah tangga sehat meningkat dari 86,78% meningkat menjadi 89,60%, cakupan air bersih mencapai 100%, cakupan jamban keluarga menjadi 94,80% meningkat dari 92,94%, dan cakupan saluran pembuangan air limbah dari 77,46% menjadi 81,20%.

Keberhasilan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya preventif maupun melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, serta peningkatan manajemen dan kualitas pelayanan pengobatan di puskesmas

maupun rumah sakit.

Terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, dilakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan melalui puskesmas dan rumah sakit. Peningkatan pelayanan dari aspek manajemen dilakukan dengan akreditasi rumah sakit dan puskesmas serta penjaminan biaya kesehatan dengan program BPJS kesehatan maupun Jamkesda.

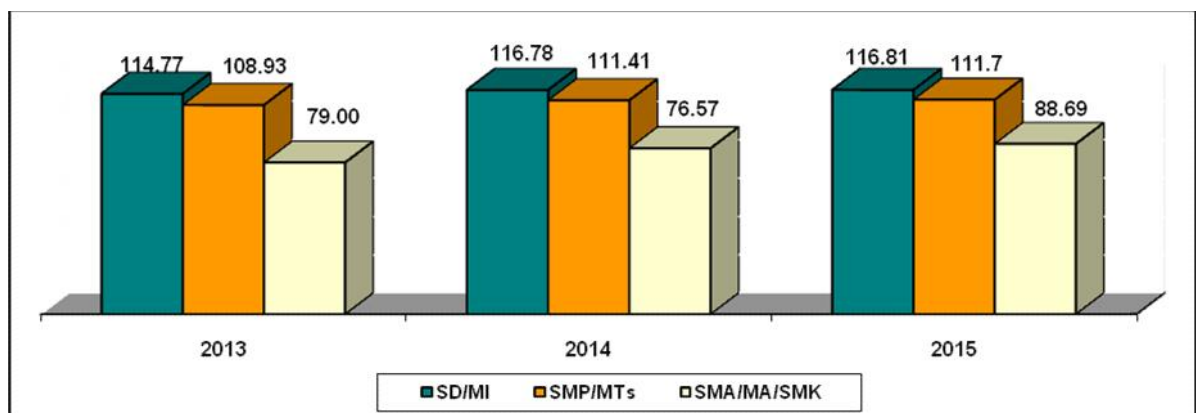
Peningkatan kualitas penduduk dilakukan pula melalui pembinaan kelembagaan keluarga dengan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Program keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, serta meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

### **Pembangunan Bidang Pendidikan**

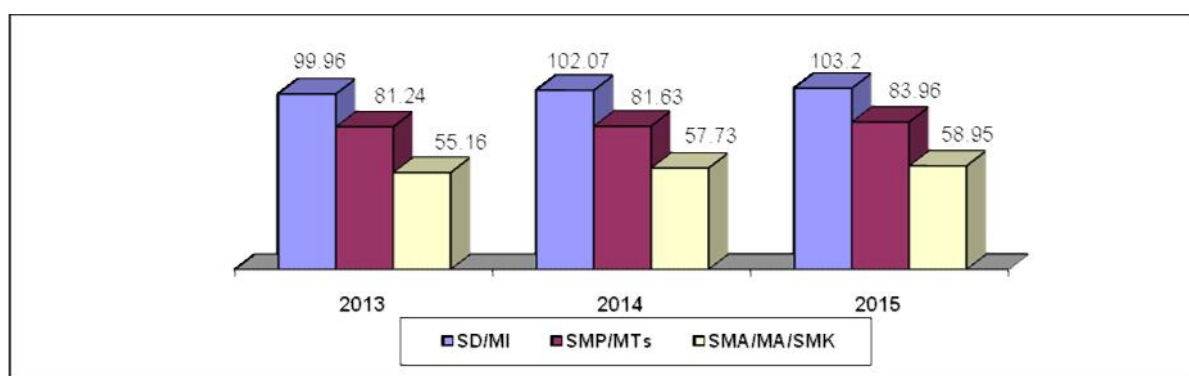
Dalam pembangunan bidang pendidikan diupayakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem pendidikan.

Keberhasilan pelayanan pendidikan dasar dan menengah pada aspek aksesibilitas masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar tingkat SD dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang sudah mencapai lebih dari 100%.

**Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013-2015 (dalam%)**



**Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2015 (dalam%)**



Dari aspek tenaga pendidik, kualitas dan kuantitas untuk pelayanan diupayakan untuk dapat terpenuhi. Secara umum, kualitas guru di Kabupaten Sleman cukup baik, dilihat dari persentase guru layak mengajar pada tahun 2015 tingkat SD sebesar 85,36%, tingkat SMP sebesar 87,53%, dan tingkat SMU sebesar 92,04%. Meskipun secara kuantitas jumlah guru mengalami penurunan, namun kecukupan jumlah jam pelajaran bagi siswa dapat terpenuhi.

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dapat dilihat pula dari indikator angka melek huruf. Selama tiga tahun terakhir angka melek huruf telah mencapai 98% lebih. Pada tahun 2015 angka melek huruf sebesar 98,80. Hal ini ditunjang dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan baca tulis, semakin terbukanya akses komunikasi di pedesaan, meningkatnya kebutuhan mengikuti perkembangan informasi, dan semakin luasnya cakupan layanan perpustakaan.

#### **Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Publik Yang Semakin Baik**

Upaya mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik yang semakin baik, dilaksanakan dengan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, sarana menjaga ketersediaan air baku, meningkatkan prasarana di pedesaan, dan peningkatan kaulitas sarana gedung pemerintah.

Guna menumbuhkan swadaya masyarakat, dalam pembangunan jalan, PemKab memberikan bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya 1.106 drum. Dari berbagai upaya yang dilaksanakan, pada tahun 2015 jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 379,58 km atau sebesar 54,26% dari panjang keseluruhan 699,51 km. Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2014 yang sebesar 51,60%. Sedangkan pembangunan dan rehabilitasi jembatan dapat meningkatkan kualitas jembatan yang ada, serta meningkatkan jumlah saluran air dengan gorong-

gorong.

Dalam rangka upaya mengurangi kerusakan prasarana jalan dan lingkungan, dilakukan pemeriksaan rutin bagi kendaraan bermotor. Tahun 2015 telah dilakukan pemeriksaan 3.000 lebih kendaraan umum dan 17.000 lebih kendaraan bukan umum. Disamping itu pula dilakukan pembinaan kepada juru parkir tepi jalan umum dan pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan perhubungan darat mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perhubungan berupa Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2015.

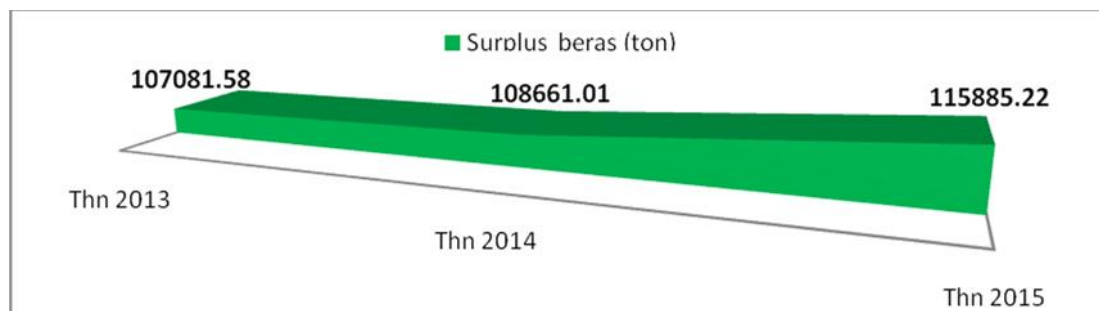
Sedangkan pada penyediaan sarana dan prasarana pengairan berupa bendung dan irigasi, setiap tahun dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan kualitasnya.

No	Jenis	Baik		Sedang		Rusak	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.	Bendung Permanen (buah)	389	415	380	435	185	105
2.	Bendung Semi Permanen (buah)	149	158	46	41	13	9
3.	Saluran Irigasi primer (m)	333.123	344.196	80.946	69.919	6.058	6.012
4.	Saluran Irigasi sekunder (m)	239.094	240.898	53.203	54.002	25.183	22.580

Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat, diupayakan pemenuhan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, dan menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan.

### Pembangunan Sektor Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diupayakan untuk terus mampu memantapkan ketahanan pangan masyarakat, bahkan tetap mampu mewujudkan surplus pangan baik bahan pangan nabati maupun hewani. Pada tahun 2015 produksi padi sawah meningkat dari 314 ribu ton menjadi 328 ribu ton atau naik 4,54% dibanding tahun 2014. Produksi tersebut dapat menghasilkan beras 207 ribu ton meningkat dari 198 ribu ton bila dibandingkan produksi tahun 2014.





Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, penanganan pasca panen, pengembangan perbenihan/pembibitan, sekolah lapang petani, peningkatan kemampuan lembaga petani, penerapan teknologi tepat guna, serta pelatihan teknologi modern bercocok tanam.

Beberapa komoditas hortikultura yang mengalami peningkatan produksi di tahun 2015, antara lain salak, jagung, pisang, dan cabe. Beberapa komoditas perkebunan juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2014 diantaranya produksi kopi, dan tembakau rakyat.

Dalam sub sektor peternakan, populasi ternak pada tahun 2015 secara umum juga mengalami peningkatan, dibandingkan tahun 2014. Peningkatan ini berkisar antara 0,06% sampai dengan 0,88%.

Salah satu sub sektor unggulan Kabupaten Sleman dalam peningkatan ketahanan pangan adalah sub sektor perikanan. Jumlah produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan hias terus meningkat.

No.	Produksi Ikan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Ikan Konsumsi (ton)	25.883,79	31.120,5	36.627,00
2.	Ikan Has (ekor)	14.647.600	16.127.000	16.300.400
3.	Benih Ikan (ekor)	947.330.900	994.616.500	1.021.216.850

Tingkat ketersediaan ikan konsumsi di Sleman lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketersediaan ikan konsumsi di Provinsi DIY yaitu sebesar 21,74 kg per kapita. Peningkatan ketersediaan ikan dan ternak tersebut, meningkatkan tingkat ketersediaan protein hewani per kapita per tahun, yang mencapai 17,71 kg/kapita/tahun.

Salah satu program yang sedang dikembangkan dalam perikanan adalah sistem perikanan minapadi kolam dalam dan ugadi (udang galah padi), yang mendapat dukungan dari *Food and Agricultural Organization/FAO*, Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Minapadi dan ugadi merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian menuju peningkatan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan. Pelaksanaan minapadi dan ugadi di Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup berhasil, sehingga menjadi percontohan nasional maupun internasional.

Keberhasilan dalam bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan

ditunjukkan pula oleh prestasi yang diraih antara lain Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Sedangkan dalam bidang perikanan diraih penghargaan Juara I Lomba Pelaku Utama Berprestasi, dalam rangka Penghargaan Adibhakti Mina Bahari, atas nama Kelompok Pembudidaya Ikan Mino Ngremboko, Bokesan, Sindumartani, Ngemplak.

### **Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup Dan Bencana Alam**

Prioritas peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan bencana alam ditujukan untuk pembangunan yang lestari dengan diarahkan pada perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, pengelolaan lingkungan yang baik dan penanggulangan terhadap bencana. Dalam pemanfaatan ruang, digunakan sebagai acuan makro adalah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Secara lebih detail perencanaan wilayah telah dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Studi RDTR yang disusun telah sampai saat ini telah mencakup seluruh luas wilayah Kabupaten Sleman atau 100%.

Sedangkan dalam pengelolaan lingkungan kebijakan yang diterapkan adalah menjaga kualitas sumber daya alam dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya menjaga kualitas sumberdaya alam dilakukan dengan melakukan pembinaan kesadaran masyarakat dalam melakukan usaha/kegiatan.

Pada tahun 2015, jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dapat mencapai 99,68% atau sebanyak 945 dari 948 unit usaha yang harus memiliki dokumen lingkungan. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 99,21%. Peningkatan kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup juga terlihat dari perkembangan usaha yang telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pada tahun 2014 usaha/kegiatan sebesar 89,10% atau berjumlah 139 dari 156 usaha/kegiatan, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 94,80% atau 148 dari 156 usaha/kegiatan.

Di samping melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha, upaya lain yang ditempuh dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelestarian air terus dilakukan dengan melindungi sumber air bersih dari pencemaran air tanah. Untuk itu telah dikembangkan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat / Sanitasi Berbasis Masyarakat (SLBM/SANIMAS).

Sebagai wujud konsekuensi wilayah Sleman sebagai daerah resapan air, dalam rangka perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dilakukan melalui pemulihan lahan kritis, mengintensifkan penghijauan dengan berbagai gerakan di masyarakat dan memperbanyak pembuatan ruang terbuka hijau. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 luas lahan kritis dan sangat kritis mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,82% dan 8,22%. Penurunan luas lahan kritis ini diperoleh dari dukungan kegiatan pemerintah, penghijauan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Luas hutan rakyat pada tahun 2014 seluas 4.618,69 ha juga meningkat sebesar 2,94% menjadi 4.754,28 ha pada tahun 2015.

Kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, dapat disebabkan pula oleh terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi pada tahun 2015 meliputi bencana angin kencang yang terjadi 40 kali di hampir seluruh wilayah, kekeringan yang terjadi di beberapa padukuhan di kecamatan Prambanan dan satu padukuhan di kecamatan Gamping, 4 kali bencana banjir di beberapa wilayah, tanah longsor di Prambanan, dan kebakaran 140 kejadian. Adapun penanganan terhadap kerusakan yang terjadi telah dilakukan langkah-langkah antara lain pemberian bantuan dana, logistik, material, dan rehabilitasi fisik sarana prasarana dengan nilai mencapai Rp365 juta lebih.

### **Pemantapan Dan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban**

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan harus diimbangi dengan pemantapan dan stabilitas keamanan dan ketertiban. Upaya meningkatkan kondisi masyarakat yang lebih aman dan tertib dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketertiban dalam berusaha, peningkatan koordinasi lintas instansi, dan pengendalian keamanan secara umum.

Secara garis besar, gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Sleman masih di dominasi oleh pelanggaran perda dan unjuk rasa. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban tersebut diatasi dengan berbagai upaya preventif dan persuasif sehingga permasalahan dapat dilokalisir dan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Dari aspek politik, masyarakat Sleman memiliki kedewasaan demokrasi yang baik, artinya masyarakat memiliki kesadaran sendiri menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aspirasi dan menghormati hak pilih orang lain. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2015 yang

telah terselenggara dengan lancar, situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Sleman tetap kondusif. Permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan koordinasi antara Tim Dukungan Kelancaran Pilkada yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan KPU, Panwaslu, Polres, Kodim, dan Kejaksaan Negeri. Demikian juga dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada 35 desa secara serentak dapat berjalan baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada tahun 2015 sebesar 70,00% dan untuk pemilihan kepala desa sebesar 80,51%.

### **Peningkatan Pemberdayaan Dan Peran Perempuan**

Dalam rangka pencapaian prioritas peningkatan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang, beberapa kebijakan teknis yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait gender, antara lain melalui implementasi analisis gender dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahap kesadaran akan kesetaraan gender di Kabupaten Sleman, sudah semakin baik. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang telah dihitung tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tahun 2013 menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2012 yaitu dari angka 94,75 menjadi 95,5 dan pada tahun 2014 sudah mencapai angka 96,09. Artinya angka tersebut menunjukkan ketimpangan gender yang semakin mengecil.

Dalam rangka fasilitasi untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, diupayakan penanggulangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan maupun anak. Berkaitan dengan hal ini telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang pada awal tahun 2015 berubah menjadi Unit Pelayanan Tekhnis Daerah P2TP2A. Guna memberikan perlindungan terhadap perdagangan perempuan dan anak telah dibentuk Gugus Tugas *Trafficking* sebagai forum untuk berkoordinasi dengan semua pihak.

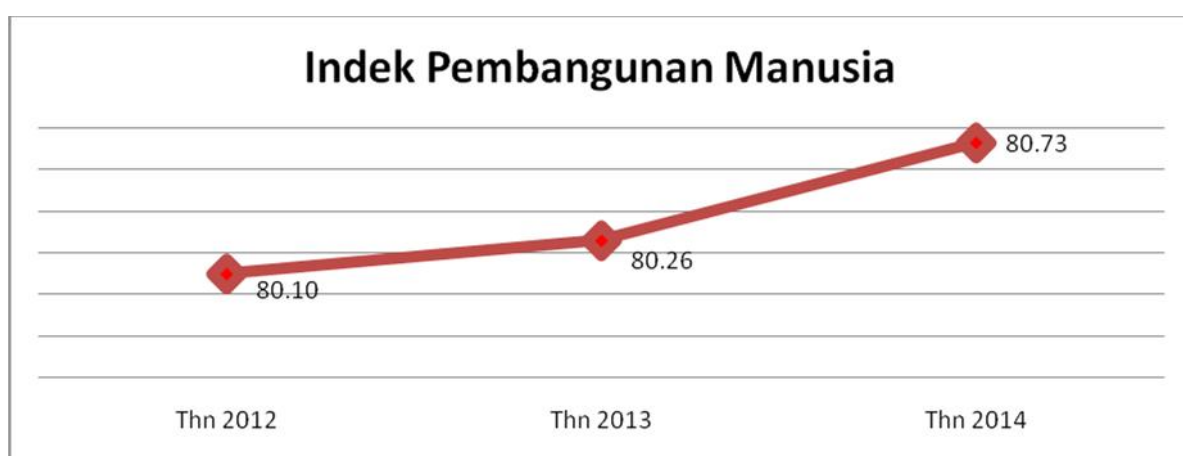
### **Penutup**

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah selama tahun 2015, menunjukkan berbagai capaian. Secara makro, perkembangan ekonomi Sleman menunjukkan peningkatan. PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2015 menurut harga berlaku mencapai Rp21,417 trilyun meningkat dari tahun lalu sebesar Rp20,417 triliun. Sedangkan menurut harga konstan sebesar Rp8,287

trilyun meningkat dari Rp7,871 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2015 dalam perhitungan sementara mencapai 5,28%, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,81%.

Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku meningkat dari sebesar Rp 17,92 juta pada tahun 2014 menjadi Rp18,34 juta pada tahun 2015. Sedangkan atas harga konstan pada tahun 2014 sebesar Rp6,79 juta meningkat menjadi Rp7,10 juta pada tahun 2015.

Dilihat dari indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga aspek yakni kesehatan, pendidikan dan pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat.



Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, maupun satuan kerja vertikal. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Kami berharap keberhasilan yang telah dicapai dapat dilanjutkan, bahkan lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera. Sedangkan hal-hal yang dianggap kurang berhasil menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Sleman, 28 Maret 2016

**BUPATI SLEMAN,**

**SRI PURNOMO**